



## **MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM): OBJEKTIFIKASI KRITIS PENDIDIKAN SENI**

Rachmat<sup>1</sup>, Hartono<sup>2</sup>, Syakir Muharrar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Seni Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

E-mail: [1rachmatjarot@students.unnes.ac.id](mailto:1rachmatjarot@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Kurikulum merupakan hal yang statis, hal ini berjalan di Indonesia ditandai seiringnya paradigma menteri yang membawahnya. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjawab landasan ideologi terhadap implementasi kebijakan MBKM dan relevansinya terhadap pendidikan seni. Hasil penelitian adalah 1. Keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dengan sistem Kampus Merdeka ini pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan superstruktur, 2) Pihak yang diuntungkan adalah pelaku industri global, pelaku industri dalam negeri, dan pemerintah, 3) Tentunya publik yang sangat dirugikan, sebab kebijakan ini hanya menguntungkan bagi yang memanfaatkan peluang ekonomi kebijakan tersebut, 4) Pendidikan seni sebagai paradigma penyadaran kritis memungkinkan peserta didik terintegrasi dengan realitas sosial-masyarakat, penyedia agen perubahan sosial.

Kata Kunci: MBKM, Tata Kelola, Perguruan Tinggi, Pendidikan Seni

### **Abstract**

Curriculum is a static, it works in Indonesia as marked by the paradigm of the minister who supervises it. The purpose of writing this article is to answer the ideological basis for the implementation of the MBKM policy and its relevance to arts education. The results of the research are 1. The skills acquired during education with the Independent Campus system are ultimately to meet the needs and interests of the superstructure, 2) The parties who benefit are global industry players, domestic industry players, and the government, 3) Of course the public is greatly disadvantaged, because this policy only benefits university institutions, individuals, companies that have an interest in and take advantage of the economic opportunities of the policy, 4) Arts education as a critical awareness paradigm allows students to be integrated with social-community realities, providing agents of social change.

Keywords: MBKM, Governance, Higher Education, Arts Education

## 1. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk menciptakan potensi sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetensi dalam pembangunan disegala sektor, memerlukan tangan-tangan terampil dan inovatif serta pemikiran yang cerdas. Tujuan Pendidikan adalah menciptakan manusia yang seutuhnya serta memiliki kualitas demi terciptanya kesejahteraan nasional (Ridwan, 2022: 48). Tentunya hal ini tidak terlepas dari tata kelola pendidikan yang memumpuni. Maka dari itu semua kegiatan sejatinya diawali oleh perencanaan. Perencanaan sendiri memerlukan kematangan sebelum dilaksanakan kegiatannya. Tidak terkecuali pembelajaran yang sangat penting untuk dilakukan perencanaan terlebih dahulu guna tercapainya tujuan. Perencanaan pembelajaran sendiri adalah setiap kegiatan yang dibuat oleh guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan setiap kegiatannya diutamakan tujuan pembelajaran yang

ingin dicapai bagaimana isi materi yang sesuai kemudian penggunaan metode yang disesuaikan usia anak dalam mencapai perkembangannya, dan melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian berhasil tidaknya kegiatan yang telah direncanakan (Qoriah et al., 2021: 552). Dilanjutkan oleh (Eq & Suryad., 2020) bahwa perencanaan merupakan aspek pertama dan utama dalam memulai serangkaian kegiatan organisasi sebab perencanaan adalah proses perumusan pencapaian tujuan dan pada akhirnya akan dijadikan sebagai pedoman di masa yang akan datang. Perencanaan adalah penyusunan pedoman untuk dilaksanakan supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karenanya, penyusunan rencana merupakan starting point dalam menentukan langkah selanjutnya.

Suatu Perguruan Tinggi harus mempunyai tata kelola yang baik (good governance), karena tata kelola ini berfokus pada pengendalian dan pengontrolan baik struktur organisasi, tugas fungsi personil, mekanisme tata

kelola dan kepemimpinan. Tata kelola ini apabila dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, maka akan mendorong dosen untuk bekerja secara profesional, karena struktur organisasi jelas, tugas-tugas, fungsi personil dan mekanismenya jelas dan diterapkan (Connie Chairunnisa, 2015: 2). Tentunya pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang memiliki masa depan yang berdaya guna dan mampu bersaing merupakan salah satu tugas dari perguruan tinggi. Menyelenggarakan pendidikan merupakan aktivitas pokok suatu perguruan tinggi sesuai dengan fungsi utamanya (Tumoka, 2021: 2)

Pendidikan yang berkualitas sering dikaitkan dengan manajemen tata kelola yang berkualitas. Namun, membangun dan membentuk manajemen yang efektif sangatlah sulit. Meskipun demikian, upaya untuk menghasilkan masyarakat yang terdidik akan lebih berhasil jika semua permasalahan, tantangan dan permasalahan yang terdapat di sekolah

dapat dan dapat diatasi (A. H. A. Rahman et al., 2021: 174). Nadiem kemudian menjawab keraguan publik dengan membuat gebrakan dalam dunia pendidikan Jokowi-Ma'ruf. Salah satunya adalah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Menurut Nadiem “pendidikan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan”. Oleh sebab itu kampus harus dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan bersaing dengan sistem pasar yang terus berkembang. Kebijakan tersebut dianggap dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia karena memberikan peluang bagi perguruan tinggi (PT) secara mandiri untuk dapat menyesuaikan dan mampu bersaing di tingkat global. Kemunculan Kampus Merdeka merumuskan paradigma baru dalam pendidikan, salah satunya menjadikan setiap perguruan tinggi lebih otonom agar dapat menciptakan budaya pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi

(Sudaryanto et al., 2020). Mengutip Sallis, Balbo juga menegaskan beberapa poin yang khas dimiliki dunia Pendidikan yaitu berkenaan dengan kualitas, penting untuk memandang pendidikan sebagai layanan, bukan produk. Balbo mengatakan bahwa layanan tersebut membutuhkan kontak langsung antara penyedia dan pengguna akhir (Doringin et al., 2020: 39).

Tata Kelola kebijakan pertama, PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS (perguruan tinggi swasta) diberi kebebasan membuka prodi (program studi) baru. Tata kelola kebijakan yang kedua yaitu mengenai sistem akreditasi. Tata kelola pokok kebijakan yang ketiga: PTN layanan umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) diberi kebebasan untuk menjadi PTN Badan hukum (BH). Tata kelola pokok kebijakan yang keempat yakni mengenai hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit semester (SKS).

Kebijakan mengenai tata kelola kampus merdeka ini perlu dilihat lebih jauh motif dan kepentingan negara dibalik diberlakukannya keempat

kebijakan baru tersebut. Tulisan ini menggunakan dua teori sosial untuk menganalisis tata kelola kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan kedua teori ini saling terkait erat. Kedua teori tersebut adalah mengenai ISA atau *Ideological State Apparatuses* yang dikembangkan oleh pemikir Perancis Louis Althusser, dan dilengkapi dengan teori Hegemoni yang digagas oleh pemikir Italia Antonio Gramsci. Elaborasi dari dua teori kritis ini diharapkan memberikan akses sebagai jawaban kebijakan MBKM yang relevansinya terhadap pendidikan seni.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai tata Kelola kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Setelah mencatat, kedua, memadukan segala temuan, secara teoretik menggunakan konsep

ideology state apparatus oleh Althusser, dan konsep hegemoni oleh Gramsci. Terakhir adalah memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya tentang kapitalisme pendidikan dalam MBKM sebagai objek dalam ideologi kritis pendidikan seni.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Saat ini sudah setahun lebih berjalan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Nadiem Makarim selaku Mendikbud waktu itu, sekarang menjabat sebagai Mendikbud Ristek, diberlakukan. Tampaknya dunia kampus atau pendidikan tinggi banyak memberikan respons positif terkait kebijakan baru ini. Meski, tidak menutup kemungkinan masih ada ceruk persoalan yang muncul terkait baik konsep, substansi maupun implementasinya. Namun demikian, setiap kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi sangat diperlukan kajian-kajian kritis terkait kebijakan tersebut.

### **1. Landasan Ideologi Kebijakan MBKM**

Berkaitan dengan kebijakan MBKM, tampak jelas bahwa kebijakan ini mengarah pada kelangsungan proses reproduksi keterampilan tenaga keterampilan guna kelanjutan proses reproduksi kapitalisme. Pengetahuan, keterampilan yang diperoleh selama pendidikan dengan sistem Kampus Merdeka ini pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kapitalis, sehingga lulusan pendidikan tinggi ini memiliki kompetensi siap kerja (Kodrat, 2021).

Untuk mencapai tujuan itu, kebijakan MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya

(Kholik et al., 2022). Keterampilan dan pengetahuan ini dapat diperoleh peserta didik atau mahasiswa dengan mengikuti salah satu atau beberapa kegiatan belajar di luar (kelas) perguruan tinggi selama dua semester, yaitu magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Kegiatan-kegiatan tersebut yang oleh Althusser dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini mempelajari pengetahuan tentang bagaimana (*know how*) (Kholik et al., 2022). Selain menimba keterampilan dan pengetahuan teknis tersebut, para mahasiswa selama proses pembelajaran juga akan mempelajari 'aturan' dari perilaku baik (*the 'rules' of good behavior*) seperti aturan-aturan moral, profesionalisme, berbahasa yang sopan dalam lingkungan kerja, dan lain

sebagainya. Kebijakan MBKM tidak menawarkan kebaruan dari apa yang oleh Althusser gagas bahwa institusi pendidikan merupakan lembaga yang mereproduksi keterampilan dan pengetahuan, tetapi pada saat yang bersamaan juga mereproduksi ketundukan terhadap aturan. Maka, lulusannya merupakan produk yang siap terjun ke dunia kerja, menjadi tenaga kerja yang melanjutkan reproduksi kapitalisme.

Revolusi Industri 4.0, pemerintah menggalakan MBKM ini untuk mempermudah akses para pelaku industri global tersebut untuk mengekspansi pasar Indonesia, dan menyediakan generasi mudanya sebagai pekerja-pekerja pabrik yang "berkualitas" dengan iming-iming pendidikan merdeka. Pemerintah terlalu memperhatikan konteks industri global dalam menyusun kebijakan MBKM ini, padahal banyak potensi dalam negeri yang belum tersentuh dan membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengolahnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan sistem pendidikan ini juga

terjadi karena sistem pendidikan lama dianggap tidak mumpuni untuk menjawab kebutuhan industri akan pekerja-pekerja yang bisa bersaing di pasar global. Kini setidaknya para pelaku industri mendapat jaminan perkembangan bisnis karena para pekerja, yang adalah tulang punggung bisnisnya terlahir dari kurikulum pendidikan yang memang secara terang-terangan berbasis pada industri. (Ismulyadi, 2021).

Segala bentuk kerja sama, pengembangan jaringan, pembukaan prodi baru, pertukaran mahasiswa, pengembangan desa, penelitian, membutuhkan modal sehingga hanya kampus-kampus besar dan bergengsi yang mampu tumbuh dalam persaingan. Prodi-prodi, kerjasama, akreditasi, badan hukum, serta hak belajar tiga semester mengikuti kepentingan politik ekonomi global.

Tidak dapat dipungkiri kebijakan pemerintah saat ini berfokus untuk mempersiapkan SDM masyarakat Indonesia yang siap bersaing dengan pasar internasional. Namun akibatnya SDM yang

dihasilkan pun hanya akan berfokus untuk mendukung perkembangan industri di Indonesia. Berbicara tentang siapa yang dirugikan dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tentu salah satunya adalah mahasiswa di Indonesia.

## **2. Relevansi Tata Kelola Program MBKM Terhadap Pendidikan Seni**

Peran pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik memilih dan memberi mereka pengalaman-pengalaman yang akan membantu mereka menemukan makna dari kehidupan mereka (peserta didik) bukan berarti peserta didik boleh melakukan apa saja yang mereka suka. Pendidik menanyakan tentang ide ide yang dimiliki oleh para peserta didik dan mengajukan ide ide lain kemudian membimbing mereka untuk memilih alternative alternative, sehingga mereka melihat bahwa kebenaran tidak terjadi pada manusia melainkan dipilih oleh manusia. Pendidik harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan seksama sehingga siswa mampu berpikir kritis (Rachmat, 2021).

Pendidik dan lembaga formal mempunyai peran pokok terhadap pengembangan siswa yang peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik yang ada disekitarnya, dengan menumbuhkan kesadaran kritis peserta didik sejak dini terhadap segala fenomena ketidakadilan yang ada, diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk selalu bersikap kritis terhadap keadaan atau lingkungan yang tidak adil contohnya dengan memberikan tanggung jawab kepada peserta didiknya untuk melihat fenomena sosial di lingkungan sosial mereka dan beorientasi kepada mind, body, soul yaitu membuat karya seni sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Maka peserta didik sudah diasah kemampuannya dalam kesadaran kritis untuk berpikir dan bertindak secara kritis dengan berkarya dan peduli terhadap masyarakat. Misalnya yang berminat dengan disiplin ilmu musik, peserta didik bisa membuat karya dengan membuat lagu yang kritis terhadap realita sosial, begitupun dengan disiplin ilmu seni

rupa, bisa saja membuat design baju atau lukisan untuk menuangkan kesadaran kritisnya.

Pendidikan seni dapat menghasilkan transformatif yang baik jika pendidikan yang bersifat penyadaran kritis yang memungkinkan peserta didik terintegrasi dengan realitas social-masyarakat dimana dia hidup. Ketika kesadaran kritis hilang bersama dengan pendidikan yang tumpul dan mengalami dekadensi, kita saksikan bagaimana bangsa ini sama sekali tak memiliki harga diri. Mengintegrasikan realitas sosial ke dalam praktik berkesenian dalam proses pendidikan seni akan membuat keluaran pendidikan tidak sekedar berkarya dan tahu banyak informasi pengetahuan, tetapi juga akan sanggup memberikan nilai praktis atas informasi yang diperolehnya.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Tata kelola kebijakan MBKM hadir lebih pada untuk menjawab kebutuhan kapitalis. Beragam tangan dan kepentingan politik tersebut terlibat dalam pembentukan berbagai program

dan kebijakannya. Di sinilah letak peranan yang besar dari tata kelola pendidikan seni, yang bertujuan menghasilkan individu-individu yang kritis, kreatif, penuh inisiatif dan mempunyai motivasi besar untuk perubahan sosial

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, S., & Skoczylis, J. (2022). Prevent, Ideology and Ideological State Apparatus: Analysing Terrorism Prevention Policies Using Althusser's Framework. *Millennium: Journal of International Studies*, 50(2), 405–429. <https://doi.org/10.1177/030582982111063929>
- Anggraeni, R., & Wijaya, E. (2019). Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 494. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p05>
- Arifin, J. (2021). Hegemoni Bahasa Bugis Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat Kelurahan Olo-Oloho Kabupaten Kolaka Utara. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.62>
- Aurea De Carvalho Costa. (2021). Gramsci: The Cross Matching Of An Individual Experience And An Analysis Of Historical reality As A Critique Of Capitalist Education. *Revista HistedBR On-Line*, 21, 1–21. <https://doi.org/10.20396/rho.v21i00.8659721>
- Connie Chairunnisa. (2015). Hubungan Tata Kelola Universitas dan Profesionalitas Dosen, Dengan Mutu Layanan Pendidikan. *FAKTOR: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(April), 49–58.
- Debora Klippel Fofano, Hi. L. R. (2021). Ideologia E Educação Na Perspectiva De Louis Althusser. *Educação Em Revista*, 37, 1–18. <https://doi.org/10.1590/0102-4698232216>
- Doringin, F., Prihanto, J. N., Wahana Dika, L., & Tarigan, N. M. (2020). Mengevaluasi Tata Kelola Lembaga Pendidikan Menggunakan Konsep Total Quality Management. *Jurnal Humanipreneur*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.53091/jhup.v1i1.15>
- Eq, N. A., & Suryad;, S. M. (2020). Model Konsseptual Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Mutu di Pesantren Modern. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 131–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1629>
- Falah, F. (2020). Kepercayaan dan Hegemoni dalam Cerpen “Dukun

- yang Selamat” Karya Joni Hendri (Kajian Hegemoni Gramsci). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 36–44.  
<https://doi.org/10.14710/nusa.15.1.36-44>
- Ghazalba, M. A. (2020). Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan (Study of The Ideology of Althusser and Gramsci’s Hegemony). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 105–117.  
<https://doi.org/10.14710/nusa.15.1.105-117>
- Ismulyadi, C. (2021). Kapitalisme Pendidikan vs Salafisme Pendidikan dalam Menghidupkan Karakter Siswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 648–657.  
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1837>
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738–748.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2045>
- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 9–14.  
<https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i1.60>
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 699–706.  
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1951>
- Palettei, A. D., Sulfemi, W. B., & Yusfitriadi. (2021). Tingkat Pemahaman Kepala Sekolah, Guru, Dan Komite Sekolah Terhadap Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 38–53.  
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1592>
- Qoriah, M., Masitoh, S., & Setyowati, S. (2021). Analisis Guru dalam Menjaga Tata Kelola Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 549–557.  
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.1453>
- Rachmat, R. (2021). Refleksi Kritis Pada Pembelajaran Seni. *Nuansa Journal of Arts and Design*, 4(2), 19.  
<https://doi.org/10.26858/njad.v4i2.14566>
- Rahman, A. H. A., Sungit, F., & Rashed, Z. N. (2021). Tantangan Manajemen Sekolah dalam Tata Kelola di Maahad Integrasi Tahfiz Sains Selangor. *Judicious*, 2(2), 174–182.  
<https://doi.org/10.37010/jdc.v2i2>

- Rahman, A., Zulkifli, & Juanda. (2020). Ruang Lingkup Inovasi Pendidikan Karakter Di Sekolah. *JPKN Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 179–191.
- Ridwan, F. (2022). Mutu Pendidikan Pesantren. *ALACRITY: Journal of Education*, 2(1), 48–55. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v2i1.56>
- Ruggieri, M. (2021). Eco and Gramsci: Unexplored Connections in Cultural Studies. *Italian Studies*, 76(4), 421–435. <https://doi.org/10.1080/00751634.2021.1923177>
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230>
- Steimberg, R. (2022). Althusser and the Absolute Beginning. *Rethinking Marxism*, 34(1), 25–40. <https://doi.org/10.1080/08935696.2022.2026748>
- Sudaryanto, S., Widayati, W., & Amalia, R. (2020). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia. *Kode: Jurnal Bahasa*, 9(2), 78–93. <https://doi.org/10.24114/kjb.v9i2.18379>
- Tumoka, I. M. R. (2021). Kebijakan Tata Kelola Layanan di Masa Pandemi Covid-19 di Universitas Muhammadiyah Sorong. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.37680/qalamun.v13i1.688>
- Wardani, A. N. (2019). Hegemoni Maskulinitas dalam Under The Greenwood Tree Karya Thomas Hardy. *Jurnal Satwika*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.22219/satwika.v02.no2.68-78>
- Wise, K. (2019). Ideological State Apparatuses in Dystopian Novels. *Digital Literature Review*, 6, 8–19. <https://doi.org/10.33043/dlr.6.0.8-19>